



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);**
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nopmor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) Sebagaimana Telah diubah dengan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 799);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

27. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Rancangan APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 3

Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 3.437.599.205.635,- (*tiga triliun empat ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 401.396.408.635,- (*empat ratus satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 123.016.354.000,- (*seratus dua puluh tiga milyar enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.433.930.000,- (*enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 243.946.124.635,- (*dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar 123.016.354.000,- (*seratus dua puluh tiga milyar enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan;
 - b. pajak barang dan jasa tertentu makan dan/atau minuman;
 - c. pajak barang dan jasa tertentu kesenian dan Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu Parkir;
 - g. pajak Air Tanah;
 - h. pajak Sarang Burung Walet;
 - i. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - j. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - k. pajak Mineral Bukan Logam dan batuan;
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.144.432.000,- (*satu milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu makan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.372.148.000,- (*lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

- (4) Pajak barang dan jasa tertentu kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 2.387.404.000,- (*dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah*).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 40.346.809.000,- (*empat puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 408.963.000,- (*empat ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 34.213.675.000,- (*tiga puluh empat milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 23.060.084.000,- (*dua puluh tiga milyar enam puluh juta delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (12) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 5.136.140.000,00 (*lima milyar seratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 6.433.930.000,- (*enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha;
 - c. retribusi Perizinan Tertentu;

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 434.500.000,- (*empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.999.430.000,- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*), yang terdiri atas: Deviden atas penyertaan modal sebesar Rp 28.000.000.000,00 (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 243.946.124.000,- (*dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.035.820.785.000,- (*tiga triliun tiga puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.858.031.807.000,- (*dua triliun delapan ratus lima puluh delapan milyar tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 177.788.978.000,- (*seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 382.012.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta dua belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 3.465.399.205.635,- (*tiga triliun empat ratus enam puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.454.396.584.274,- (*dua triliun empat ratus lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.138.707.943.949,- (*satu triliun seratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat*

- puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).*
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.227.796.683.861,- (*satu triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 87.591.956.464,- (*delapan puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 706.484.072.832,- (*tujuh ratus enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.470.259.819,- (*dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 69.989.853.997,- (*enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 109.291.032.872,-

(seratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 505.087.489.136,- *(lima ratus lima milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah).*
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 645.437.008,- *(Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan rupiah).*
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp 0,-*(nol rupiah).*

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.236.878.272,- *(empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.*

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp 300.281.670.257,- *(tiga ratus milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 *(nol rupiah).*
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 300.281.670.257,- *(tiga ratus milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).*

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 45.000.000.000,-*(empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:*

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp 17.200.000.000,- (*tujuh belas milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp 17.200.000.000,- (*tujuh belas milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 27.800.000.000,- (*dua puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 27.800.000.000,- (*dua puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Batuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Batuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Batuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Batuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / Tambahan DBH Minyak dan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Desember 2023
Pl. BUPATI MUSI BANYUASIN



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Desember 2023
Pl. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



ANDIWIJAYA BUSRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 55



KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	401.396.408.635,00
4.1.01	Pajak Daerah	123.016.354.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.144.432.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	673.827.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	673.827.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	112.511.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	112.511.000,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	358.094.000,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	358.094.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	15.372.148.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	667.425.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	667.425.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.302.962.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.302.962.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	27.267.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	27.267.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.704.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.704.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	517.469.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	517.469.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	12.846.321.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	12.846.321.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	96.695.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	58.776.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	58.776.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	12.125.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	12.125.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	25.794.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	25.794.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.387.408.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.182.185.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.182.185.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	988.206.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	988.206.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	217.017.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	217.017.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	40.346.809.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.532.437.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.532.437.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	34.814.372.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	34.814.372.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	450.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	450.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	450.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	400.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	400.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	400.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	408.963.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	408.963.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	408.963.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.136.140.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	2.276.452.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	2.276.452.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	2.859.688.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	2.859.688.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	34.213.675.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	34.213.675.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	34.213.675.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.060.084.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	18.943.721.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	18.943.721.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.116.363.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.116.363.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.433.930.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	434.500.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	210.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	210.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	200.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	200.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	24.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	24.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.999.430.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.292.003.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	905.643.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	31.500.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	354.860.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	310.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	310.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	210.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	210.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	40.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	142.427.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	142.427.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.000.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	28.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.000.000.000,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.000.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	243.946.124.635,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	55.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	55.000.000,00
4.1.04.01.05.0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	55.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	14.750.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	14.750.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	14.750.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.731.267.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.306.936.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.306.936.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	424.331.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	424.331.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.000.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	12.000.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	12.000.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	240.380.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	240.380.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	240.380.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.725.854.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.725.854.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.725.854.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	415.365.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	3.590.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	3.590.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	173.900.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	173.900.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	118.000,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	118.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.317.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	3.317.000,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	27.208.000,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	27.208.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.076.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.076.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.663.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.663.000,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	277.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	277.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.189.000,00
4.1.04.12.14.0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes	5.189.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	169.595.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	169.595.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.432.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	29.432.000,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.500.000.000,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.500.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	234.332.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	162.413.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	85.945.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	36.848.000,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	8.015.000,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	3.724.600,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	2.309.000,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	6.293.000,00
4.1.04.15.08.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK	3.000,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.164.000,00
4.1.04.15.08.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.299.000,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	4.433.000,00
4.1.04.15.08.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	1.886.000,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	356.000,00
4.1.04.15.08.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.400,00
4.1.04.15.08.0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	905.000,00
4.1.04.15.08.0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	799.000,00
4.1.04.15.08.0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.921.000,00
4.1.04.15.08.0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.700.000,00
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	248.000,00
4.1.04.15.08.0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	92.000,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	613.000,00
4.1.04.15.08.0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK	272.000,00
4.1.04.15.08.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	564.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.08.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	22.000,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.919.000,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	65.000.000,00
4.1.04.15.09.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	535.000,00
4.1.04.15.09.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.200.000,00
4.1.04.15.09.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.184.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	223.029.176.635,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	223.029.176.635,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	223.029.176.635,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.035.820.785.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.858.031.807.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.858.031.807.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.456.171.136.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.008.395.416.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	20.821.062.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	271.172.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9.934.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	245.467.887.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	931.068.420.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	567.419.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	175.480.742.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	71.919.020.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.170.064.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	401.860.671.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	401.860.671.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177.788.978.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	177.788.978.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	177.788.978.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.606.525.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.905.168.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	80.553.299.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	582.701.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	43.141.285.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	382.012.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	382.012.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	382.012.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	382.012.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	382.012.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.437.599.205.635,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.454.396.584.274,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.138.707.943.949,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	695.161.072.425,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	527.275.750.068,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	356.468.920.864,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	170.806.829.204,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	51.051.783.243,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.924.037.642,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17.127.745.601,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.218.338.328,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.202.008.728,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	16.329.600,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.273.153.506,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.212.893.506,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	60.260.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.042.339.686,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.395.869.410,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.646.470.276,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.781.487.386,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.634.414.143,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.147.073.243,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.521.633.139,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.441.584.739,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	80.048.400,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	194.287.201,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	121.074.037,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	73.213.164,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.154.152.073,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.870.160.077,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.283.991.996,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.533.485.661,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.077.004.503,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	456.481.158,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.886.442.995,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.584.934.743,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.301.508.252,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.454.219.139,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.334.382.123,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	119.837.016,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	774.000.000,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	774.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	296.750.373.179,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	270.362.677.179,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	268.021.945.179,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.340.732.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.807.296.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12.309.796.000,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	497.500.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	13.580.400.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	13.580.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.703.345.199,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.261.195.599,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	25.830.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	340.462.128,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	25.200.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	197.200.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	7.600.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.494.240,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	8.607.144,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	43.899.258,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	354.902.829,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	250.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	442.149.600,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	442.149.600,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.882.798.255,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	183.796.200,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	183.796.200,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.214.200,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.214.200,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	3.742.276.755,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	3.742.276.755,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.082.450.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	200.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	34.710.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.827.740.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.355.400.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.355.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	999.606.480,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	35.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	35.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.900.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.900.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	56.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	56.000.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.600.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.600.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	69.136.072,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	69.136.072,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	468.928,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	468.928,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.500.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.500.000,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	342.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	342.000,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	600.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	600.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	817.059.480,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	15.612.956,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	208.092.716,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.322.746,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	25.399.246,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	44.259.496,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	5.500.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.073.560,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.271.704,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	52.063.935,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	301.722.785,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	154.740.336,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	111.217.628.411,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	111.217.628.411,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	111.217.628.411,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.796.683.861,00
5.1.02.01	Belanja Barang	378.725.253.328,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	378.613.963.618,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.323.620.340,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.769.758.024,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.940.190.267,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	65.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.004.963.820,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.365.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	123.382.150,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.910.264.065,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	92.750.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	77.219.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.979.864.659,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.749.232.031,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.265.303.175,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.759.835.372,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	210.485.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.033.447.375,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.033.763.074,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.114.234.228,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.242.731.644,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	201.971.983.026,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	30.712.580.407,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	487.345.564,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.646.710.820,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	289.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.633.927.097,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.767.071.170,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	58.104.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	81.760.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.039.202.840,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	312.150.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.113.750.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	240.275.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.159.290.380,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.384.549.340,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	33.750.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	668.766.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	33.799.500,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	360.859.450,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	9.040.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	626.100.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.200.414.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.963.754.500,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	102.970.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.411.250,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.411.250,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	105.878.460,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.330.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	102.548.460,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	433.452.242.825,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	328.147.998.592,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.544.072.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.846.571.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	653.740.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	197.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	987.400.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	188.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	59.657.550.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.293.350.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	523.319.680,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	54.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.577.100.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	925.180.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.700.580.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.777.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.245.532.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	17.559.578.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.230.300.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.898.980.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.973.103.138,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.206.100.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.766.100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	417.100.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.688.300.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	17.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	100.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	54.150.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	470.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	136.800.320,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	217.100.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.101.553.700,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	9.888.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	151.290.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	239.012.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	26.910.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.947.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	542.537.312,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.385.160.024,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	32.455.543.688,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.477.081.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.711.980.478,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	20.800.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.228.082.252,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.816.942.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	194.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	52.481.086.330,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.902.904.080,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	38.858.400.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	588.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.245.200.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.000.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	2.876.582.250,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.768.505.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	43.320.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.304.071.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	25.652.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	242.388.000,00
5.1.02.02.04.0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	13.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.041.325.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	331.989.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	308.400.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	838.425.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	570.960.000,00
5.1.02.02.04.0484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	18.475.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.403.897.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.250.607.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	526.320.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	655.800.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	76.520.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	5.009.650.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	885.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.767.633.248,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	31.604.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	18.001.980,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	267.650.188,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	600.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.925.030.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	7.002.002.221,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.300.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	940.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.480.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	210.038.590,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	112.500.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	247.903.269,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	448.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	44.115.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	940.788.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.295.154.655,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	2.011.321.655,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	388.833.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	700.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	95.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	736.880.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	49.770.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	687.110.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.851.088.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.104.450.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.746.638.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	78.411.341.423,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.081.809.664,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	521.290.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	660.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	621.124.700,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	18.709.479.700,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	324.513.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	186.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	245.940.000,00
5.1.02.03.02.0057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	81.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.715.560,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	111.431.120,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.769.418.400,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.500.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	41.807.288,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.206.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	47.286.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	455.097.896,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.796.237.490,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.356.477.490,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.319.760.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	120.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.460.783.700,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	32.193.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.705.558.700,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	562.225.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	72.510.569,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	72.510.569,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	154.150.701.842,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	153.703.046.842,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	105.258.837.068,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.444.209.774,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	447.655.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	447.655.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	85.100.833.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	85.100.833.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.722.417.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	5.465.900.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	75.712.516.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2.200.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.956.311.443,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.956.311.443,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.956.311.443,00
5.1.05	Belanja Hibah	87.591.956.464,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	314.069.584,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	314.069.584,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	314.069.584,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	82.192.376.880,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	82.192.376.880,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	82.192.376.880,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.085.510.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.085.510.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.085.510.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	706.484.072.832,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	21.470.259.819,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	21.470.259.819,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	16.095.117.819,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	600.000.000,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	10.160.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	708.013.860,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	4.627.103.959,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.375.142.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.194.672.000,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	2.180.470.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.989.853.997,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.313.280.754,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.165.893.380,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	5.165.893.380,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	147.387.374,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	64.419.100,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	58.582.054,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	24.386.220,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.957.926.004,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.796.062.528,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	649.629.408,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.436.065.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.875.314.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	95.460.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.739.594.120,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.500.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	1.500.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	160.363.476,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	160.363.476,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	41.401.708,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	41.401.708,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	17.413.458,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	638.250,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	23.350.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	166.322.720,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	166.322.720,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	116.620.250,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	22.507.470,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	27.195.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.094.093.603,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.184.890.200,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	32.461.950,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.152.428.250,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.349.829.019,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.243.735.704,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	98.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.892.234.295,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	429.412.018,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.643.726.846,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	42.720.156,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.559.374.384,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	475.352.215,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	264.014.250,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.630.549.959,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	117.102.780,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	16.992.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.055.363.180,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.677.331.516,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.585.131.516,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	392.706.603,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.124.720.786,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	6.500.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	50.261.580,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.942.547,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	82.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	15.600.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	66.600.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	10.000.000,00
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	10.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.415.873.045,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.415.873.045,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.415.873.045,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.712.490.335,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.712.490.335,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	469.072.125,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.226.363.060,00
5.2.02.08.01.0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	17.055.150,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	18.111.714.469,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.635.410.468,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.941.758.533,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.693.651.935,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.476.304.001,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	743.068.254,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	828.343.237,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	904.892.510,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	5.550.000,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	5.550.000,00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	5.550.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	184.089.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	184.089.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	184.089.000,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	1.307.136,00
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	1.307.136,00
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	1.307.136,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	86.122.125,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	26.182.125,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	12.307.125,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	13.875.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	59.940.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	59.940.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.625.649.700,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.625.649.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1.625.649.700,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	29.550.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	29.550.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	10.250.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	19.300.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.567.151.882,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.567.151.882,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.567.151.882,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.291.032.872,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	104.789.346.392,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.311.426.392,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	36.469.755.651,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.337.410.800,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.785.789.480,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.196.399.200,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	3.752.096.731,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.569.974.530,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	13.477.920.000,00
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	2.000.000.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	11.477.920.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.228.601.250,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.228.601.250,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.074.216.900,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	154.384.350,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.273.085.230,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.273.085.230,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.273.085.230,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	505.087.489.136,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	484.358.519.906,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	454.670.876.906,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	417.782.100.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.698.214.459,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	35.190.562.447,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	29.687.643.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	28.255.843.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.431.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.807.716.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.057.500.000,00
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	1.057.500.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.179.473.000,00
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	2.179.473.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	11.570.743.000,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	11.570.743.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.406.253.230,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	496.403.230,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	496.403.230,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.909.850.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.909.850.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.500.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.500.000.000,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	3.500.000.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	15.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	15.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	15.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	645.437.008,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	274.680.008,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	177.003.680,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	177.003.680,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	97.676.328,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	97.676.328,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	370.757.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	270.757.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	270.757.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	100.000.000,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	100.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.236.878.272,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.236.878.272,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.236.878.272,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.236.878.272,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.236.878.272,00
5.4	BELANJA TRANSFER	300.281.670.257,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	300.281.670.257,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	300.281.670.257,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	300.281.670.257,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	300.281.670.257,00
	Jumlah Belanja	3.465.399.205.635,00
	Total Surplus/(Defisit)	-27.800.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	45.000.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	45.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.200.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	17.200.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	17.200.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	17.200.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	17.200.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	17.200.000.000,00
	Pembiayaan Netto	27.800.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Musi Banyuasin, 29 Desember 2023

Pj. Bupati

H. APRIYADI